

LAPORAN TRI WULAN II TAHUN 2025

**LAPORAN MONITORING EVALUASI TINDAK LANJUT
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS), SP4N LAPOR!
SUAP PUNGLI DAN GRATIFIKASI**

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN



**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
PRODUK HEWAN BOGOR**

2025

**LAPORAN PENGADUAN (DUMAS), SP4N LAPOR!
SUAP PUNGLI DAN GRATIFIKASI
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
(BPMSPH)
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pengaduan terkait dugaan pelanggaran, termasuk pengaduan masyarakat (dumas), pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!), serta indikasi suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi yang masuk ke Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) selama Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai jenis, jumlah, status penanganan, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan.

II. DATA PENGADUAN

Jumlah Pengaduan

Total pengaduan yang diterima	:	0
Dumas	:	0
SP4N-Lapor!	:	0
Indikasi Suap	:	0
Pungli	:	0

Gratifikasi	:	1
Jumlah Metode Penerimaan Pengaduan		
Langsung (tatap muka)	:	1
Telepon	:	0
Email	:	0
Kotak pengaduan	:	0
Website/Aplikasi	:	0
SP4N-Lapor!	:	0
Jumlah Status Penyelesaian Pengaduan		
Selesai ditangani	:	1
Dalam proses penanganan	:	0
Belum ditangani	:	0

III. ANALISIS PENGADUAN

Berdasarkan data pengaduan yang masuk, dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Dugaan pungli dalam proses layanan BPMSPH
2. Indikasi suap untuk mempercepat layanan BPMSPH
3. Gratifikasi dalam bentuk hadiah atau fasilitas dari pihak yang berkepentingan dalam proses layanan BPMSPH

IV. EVALUASI

Terdapat laporan gratifikasi pemberian hadiah kue ringan dalam magang kedinasan melalui pengaduan langsung tatap muka. Untuk metoda pengaduan lainnya yang di terapkan di BPMSPH belum diperoleh adanya pengaduan baik, dari telepon, email, kotak pengaduan, website/Aplikasi pengaduan dan SP4N-Lapor. Hal ini dikarenakn BPMSPH telah berhasil menerapkan pelayanan

prima dan sosialisasi layanan Hallo BPMSPH dan Pengaduan Suap Pungli Gratifikasi dan K3.

V. TINDAK LANJUT

Untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk, BPMSPH telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan investigasi internal terhadap dugaan pungli dalam proses sertifikasi dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Membentuk tim kepatuhan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 khusus untuk menindaklanjuti indikasi suap dan melaporkan kepada pihak berwajib jika ditemukan bukti yang kuat
3. Melakukan sosialisasi mengenai larangan gratifikasi kepada seluruh pegawai dan memasang spanduk/banner anti korupsi suap pungli dan gratifikasi di area pelayanan

VI. UPAYA PENCEGAHAN

Selain penanganan pengaduan, BPMSPH juga melakukan upaya pencegahan, antara lain :

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) : Memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Peningkatan Transparansi : Meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Sosialisasi dan Pelatihan : Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai mengenai etika, integritas, dan anti-korupsi.

4. *Whistleblowing System* : Mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman dan terpercaya.
5. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum : Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

VII. KENDALA

Dalam proses penanganan pengaduan dan upaya pencegahan, BPMSPH menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam investigasi
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam upaya pencegahan korupsi
3. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas

VIII. KESIMPULAN

Pengelolaan pengaduan terkait dumas, SP4N-Lapor!, suap, pungli, dan gratifikasi di BPMSPH selama Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

IX. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan dan upaya pencegahan korupsi di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:


1. Peningkatan Kapasitas SDM : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang investigasi dan penanganan pengaduan.
2. Penguatan Sistem Pengawasan : Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Peningkatan Partisipasi : Meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam upaya pencegahan korupsi.
4. Evaluasi dan Perbaikan : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan korupsi dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
5. Implementasi Teknologi : Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja BPMSPH di masa mendatang.

Jakarta, 31 Juli 2025

Kepala BPMSPH




Dinar Hadi Wahyu Hartawan, MSc
NIP. 198103272006041001